

Evaluasi Kontribusi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 34 Provinsi Indonesia (2018-2022)

Azhyqa Rereantica Martkliana¹, Swarmilah Hariani^{2*}

¹ Program Studi Akuntansi, Mahasiswa/Universitas Mercu Buana, Indonesia

² Program Studi Akuntansi, Dosen/Universitas Mercu Buana, Indonesia

Corresponding Author: swarmilah@mercubuana.ac.id^{1*}

Article History

Received : 25-08-2024

Revised : 13-09-2024

Accepted : 23-09-2024

Keywords: *Economic Growth; Government Expenditures; Original Regional Income (PAD); Remaining Budget Financing (SILPA)*

ABSTRAK

Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2015, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya. Setiap daerah didorong untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penggalian dan pengembangan potensi daerah secara maksimal berdasarkan inisiatif dan kekuatan daerah itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), dan Pengeluaran Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *nonprobability sampling* dan diperoleh 170 data yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2018-2022. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif kausal dengan pengujian menggunakan Uji Regresi Linear Berganda yang diolah menggunakan SPSS versi 25. Data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Di sisi lain, SILPA tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa alokasi PAD yang lebih efektif dan pengelolaan pengeluaran pemerintah yang efisien sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini memberikan implikasi bagi kebijakan fiskal di tingkat daerah, terutama dalam pengelolaan anggaran untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

ABSTRACT

Based on Law No. 9 of 2015, regional governments had an obligation to manage and develop their regions. Each region was encouraged to advance and improve community welfare through exploring and developing regional potential to the maximum based on the region's own initiative and strengths. This research aimed to determine the influence of Original Regional Income (PAD), Surplus Budget Financing (SILPA),

and Government Expenditures on economic growth. The sampling technique used in this research was nonprobability sampling method and 170 observation data were obtained came from 34 provinces in Indonesia from 2018 to 2022. It used a causal quantitative method with testing using the Multiple Linear Regression Test processed using SPSS version 25. The results showed that PAD had a significant negative effect on Economic Growth, while Government Expenditures had a positive and significant effect on Economic Growth. On the other hand, SILPA does not show a significant influence on Economic Growth. Based on the results of this study, it can be concluded that a more effective allocation of PAD and efficient management of Government Expenditure are essential to promote regional economic growth. This study provides implications for fiscal policy at the regional level, especially in budget management to achieve sustainable economic growth.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan dan menggambarkan dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan (Tumbel et al., 2021). Pertumbuhan ekonomi merujuk pada upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat daerah (Arizal & Marwan, 2019). Kenaikan angka pertumbuhan ekonomi sering kali digunakan sebagai indikator hasil kerja pemerintah daerah maupun nasional. Semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi maka semakin efektif upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Otonomi Daerah yang sudah berlangsung hampir 22 tahun di Indonesia telah memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan potensi lokal yang selama era otonomi bisa dikatakan terpasung (Marit et al., 2021). Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2015, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, bukan hanya terkait dengan pembiayaan, tetapi juga dengan kemampuan daerah (Ahmad, 2021). Pemerintah daerah juga berkewajiban untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya sehingga setiap daerah terpacu untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penggalan dan pengembangan potensi daerah secara maksimal atas inisiatif dan kekuatan daerah itu sendiri (Kusnandar & Siswanto, 2012). Sebagai pengaruh dari otonomi daerah, sentimen positif tingkat pertumbuhan ekonomi nasional salah satunya didukung oleh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tiap provinsi di Indonesia.

Realisasi PAD di tiap provinsi di Indonesia selama lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2018, realisasi PAD di 34 provinsi di Indonesia menunjukkan persentase di atas 100%, sedikit di bawah 100% pada tahun 2019, dan turun secara signifikan pada tahun 2020 sebelum meningkat secara bertahap pada tahun 2021 dan 2022. Hal ini menunjukkan

adanya pola realisasi PAD yang bervariasi pada tahun-tahun tersebut, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor perekonomian dan kebijakan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, 2022). Permasalahan PAD diyakini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti belum optimalnya penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, atau penerimaan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Daerah juga masih melihat bahwa potensi pendapatan pajak yang besar masih diatur oleh pusat yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Rokok (Aldiansyah et al., 2019).

Sumber pendanaan daerah lainnya untuk pembiayaan berbagai fasilitas publik adalah pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya (Sanjaya & Helmy, 2021). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006, SILPA merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode (Aini & Maruf, 2020). Dalam lima tahun terakhir, persentase penyerapan SILPA selalu berada di atas 100%, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu mengalokasikan kelebihan pembiayaan anggaran untuk investasi produktif dan proyek-proyek pembangunan, yang merupakan pertanda positif bagi pertumbuhan ekonomi negara.

Sedangkan Pengeluaran pemerintah daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memainkan peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Siri et al., 2022). Data dari realisasi pengeluaran pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah mampu merealisasikan sebagian besar belanjanya untuk berbagai program dan proyek. Realisasi belanja pemerintah berfluktuasi dari tahun ke tahun, dengan puncaknya pada tahun 2019 dan terendah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mampu mengalokasikan dan menyerap dana anggaran secara efektif untuk berbagai program dan proyek, yang merupakan pertanda positif bagi perekonomian dan pertumbuhan ekonomi negara.

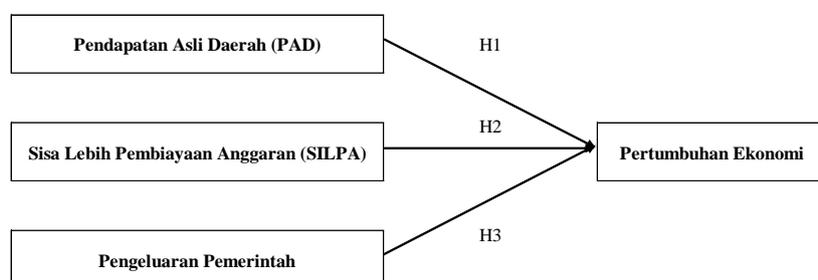
Dalam penelitian ini, konteks dan permasalahan yang mendasari penelitian kemudian didukung dengan landasan teori yang memperkuat pemahaman terhadap variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian, diantaranya adalah Teori Keagenan dan Teori Pertumbuhan Ekonomi.

Teori keagenan (Agency Theory), yang pertama kali diperkenalkan oleh Jensen & Meckling (1976), menjelaskan ketidaksamaan kepentingan antara pemilik usaha (principal) dan agen. Dalam teori ini, principal memerintah agen untuk melakukan jasa atas nama mereka dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan terbaik (Waluyo & Suryono, 2015). Nashar & Sari (2021) menyatakan bahwa teori keagenan dilandasi oleh tiga asumsi: sifat manusia, keorganisasian, dan informasi. Dalam sektor publik, hubungan keagenan juga terjadi antara masyarakat dengan pemerintah atau antara pemerintah daerah dengan pusat (Zelmiyanti, 2016). Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerah, yang kemudian harus mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pusat (Kartoprawiro & Susanto, 2018). Selain itu, legislator sebagai principal mendelegasikan wewenang kepada agen untuk membuat kebijakan baru (Sambodo & Marita, 2019). Moe (1984) menambahkan bahwa

hubungan prinsipal-agen penting dalam menganalisis komitmen kebijakan publik. Akuntabilitas dalam konteks sektor publik mengharuskan pemegang amanah (pemerintah) melaporkan segala aktivitasnya kepada masyarakat (Agustiningsih et al., 2020).

Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan peningkatan kapasitas produksi suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa. Adam Smith menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada penambahan populasi yang meningkatkan output. David Ricardo menyoroti bahwa pertumbuhan penduduk dapat menyebabkan surplus tenaga kerja, yang menekan upah dan mengarah pada stagnasi ekonomi jika tidak diimbangi peningkatan produktivitas. Teori neoklasik oleh Robert Solow menekankan pentingnya inovasi dan akumulasi modal dalam meningkatkan output (Amirullah, 2021). Solow dan Denison menunjukkan bahwa selain faktor-faktor produksi, kemajuan teknologi juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Anitasari & Soleh, 2015).

Berpijak pada fenomena dan landasan teori tersebut, serta sebagai sarana jembatan dari beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan inkonsistensi dan keterbatasan hasil penelitian mengenai pengaruh yang timbul antara PAD, SILPA dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, maka peneliti ingin membuktikan apakah PAD, SILPA dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan menggunakan sampel di seluruh provinsi di Indonesia dalam rentang waktu tahun 2018 – 2022. Berdasarkan penjelasan di atas, maka tergambar konsep yang akan dijadikan sebagai acuan peneliti dalam mengaplikasikan penelitian ini. Kerangka pemikiran yang akan diterapkan dalam penelitian ini yaitu:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif kausal untuk menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Pendekatan ini mencari hubungan sebab akibat antar variabel. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mencatat data sekunder seperti jurnal, buku, dan literatur terkait. Data utama diperoleh dari situs resmi BPS, BPK, DJPb, dan BI yang telah dipublikasikan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Penelitian ini akan menguji 3 (tiga) variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan Pengeluaran Pemerintah. Serta variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Populasi dalam penelitian

ini adalah seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia yang terdiri dari 34 Provinsi pada tahun 2018 – 2022 dan akan diuji dan dianalisis menggunakan *Statistical Packkage for the Social Siences* (SPSS) versi 25. Adapun Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain metode analisis statistik deskriptif, analisis asumsi klasik, uji kesesuaian model, uji hipotesis dan uji regresi linear berganda.

Tabel 1. Operasional Variabel Penelitian

Nama Variabel	Definisi	Pengukuran Variabel	Skala
Pertumbuhan Ekonomi (Mulyadi, 2003: 13)	Rasio untuk mengukur pertumbuhan ekonomi	$\frac{\text{PDRB (t)} - \text{PDRB (t-1)}}{\text{PDRB (t-1)}} \times 100\%$	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Fatimah, Nopiyanti, & Mintoyuwono, 2019)	Rasio untuk mengukur pendapatan asli daerah	PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + lain – lain PAD yang sah	Rasio
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Yuliantoni, & Arza, 2021)	Rasio untuk mengukur sisa lebih pembiayaan anggaran	SILPA = Realisasi Penerimaan Anggaran – Realisasi Pengeluaran Anggaran	Rasio
Pengeluaran Pemerintah (Sunusi, 2014)	Rasio untuk mengukur pengeluaran pemerintah	Pengeluaran Pemerintah = Belanja Langsung + Belanja Tidak Langsung	Rasio

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia selama periode 2018 hingga 2022. Metode pemilihan sampel menggunakan *nonprobability sampling* dengan total 170 data dari 34 provinsi selama 5 tahun. Pemeriksaan data menunjukkan pola sebaran yang menyimpang dari normalitas sehingga memerlukan penerapan teknik transformasi data dan penghilangan titik-titik data outlier. Setelah dilakukan transformasi data dan penghilangan outlier, dataset yang awalnya berjumlah 170 data disempurnakan menjadi 127 data.

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai variabel-variabel yang diteliti. Tabel 2 menyajikan hasil statistik deskriptif dari 127 data setelah proses transformasi dan penghilangan outlier.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	127	.17	21.24	3.761	5.059
SILPA	127	.08	8.03	6.648	1.069
PP	127	.49	35.83	7.868	7.858
PE	127	.00	.10	.0518	.01773
Valid N (listwise)	127				

Sumber: Output SPSS (2024)

Berdasarkan tabel di atas, PAD memiliki nilai rata-rata sebesar 3,761 triliun rupiah dan nilai standar deviasi sebesar 5,059, serta nilai minimum sebesar 0,17 triliun rupiah yang dimiliki oleh Provinsi Maluku tahun 2020 dan nilai maksimum sebesar 21,24 triliun rupiah yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat tahun 2019. SILPA memiliki nilai rata-rata 6,648 triliun rupiah dan nilai standar deviasi sebesar 1,069, serta nilai minimum sebesar 0,08 triliun rupiah yang dimiliki oleh Provinsi Maluku tahun 2018 dan nilai maksimum sebesar 8,03 triliun rupiah yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat 2020. Pengeluaran Pemerintah memiliki nilai rata-rata sebesar 7,868 triliun rupiah dan nilai standar deviasi sebesar 7,858, serta nilai minimum sebesar 0,49 triliun rupiah yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020 dan nilai maksimum sebesar 35,83 triliun rupiah yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat tahun 2019. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0518 atau 5,18%, nilai standar deviasi sebesar 0,01773, serta nilai minimum sebesar 0,0009 (0,09%) yang dimiliki oleh Provinsi NTB tahun 2022 dan nilai maksimum sebesar 0,10 (10%) yang dimiliki oleh Provinsi Papua tahun 2021.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		127
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.01653128
Most Extreme Differences	Absolute	.108
	Positive	.068

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual	
	Negative	
Test Statistic		-.108
Asymp. Sig. (2-tailed)		.108
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.001 ^c
	99% Confidence	Lower Bound
	Interval	Upper Bound
		.088
		.103

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2034056225.

Sumber: Output SPSS (2024)

Berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov (KS) pada table 3 dengan metode Monte Carlo menunjukkan dua nilai signifikansi: Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar .001 dan Monte Carlo Sig. (2-tailed) sebesar .095 dengan interval kepercayaan 99% yang memiliki batas bawah .088. Keduanya mendukung hasil bahwa data mendekati normal. Sehingga dapat dilakukan pengujian lebih lanjut.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

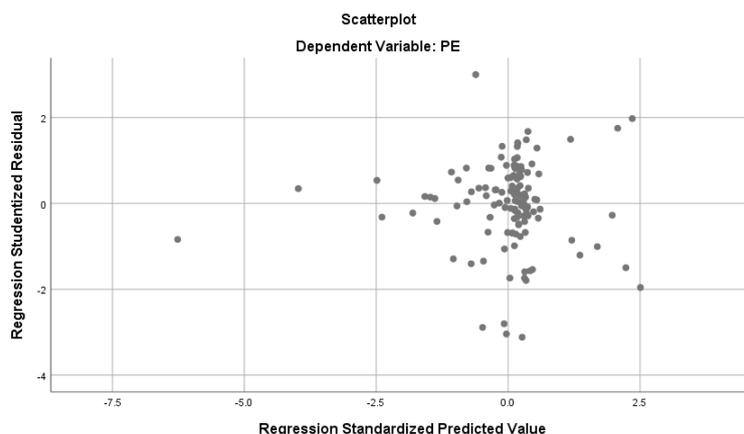
		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	PAD	.156	6.393
	SILPA	.569	1.759
	PP	.145	6.875

a. Dependent Variable: PE

Sumber: Output SPSS (2024)

Setelah dilakukan uji multikolinearitas pada table 4, diperoleh hasil bahwa nilai tolerance PAD, SILPA dan Pengeluaran Pemerintah lebih besar dari 0.10 dan nilai VIF kurang dari 10. Hasil ini menunjukkan bahwa model yang digunakan terbebas dari masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Output SPSS (2024)

Hasil uji heteroskedastisitas pada gambar 2, terlihat tidak ada pola yang terlihat, titik-titik data tersebar di atas dan di bawah, atau dekat dengan nilai nol, dan tanpa menunjukkan susunan yang berbeda. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi, sehingga menunjukkan kelayakannya untuk dianalisis.

Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.361 ^a	.130	.109	.01673	1.884

a. Predictors: (Constant), PP, SILPA, PAD

b. Dependent Variable: PE

Sumber: Output SPSS (2024)

Berdasarkan tabel 5 diatas, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1.884. Nilai Durbin-Watson berkisar antara 0 hingga 4, di mana nilai mendekati 2 menunjukkan tidak adanya autokorelasi dalam residual. Nilai 1.884 yang diperoleh dalam analisis ini mendekati 2, yang mengindikasikan bahwa tidak ada autokorelasi yang signifikan dalam model. Dengan kata lain, residual dari model regresi tidak menunjukkan pola keterkaitan yang sistematis dari satu observasi ke observasi berikutnya, sehingga asumsi independensi residual dalam analisis regresi dapat dianggap terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan adalah robust dan valid dalam hal autokorelasi.

Hasil Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.361 ^a	.130	.109	.01673

a. Predictors: (Constant), PP, SILPA, PAD

b. Dependent Variable: PE

Sumber: Output SPSS (2024)

Tabel 6 menunjukkan hasil uji koefisien determinasi dengan nilai R Square sebesar 0,130. Ini berarti bahwa hanya 13% dari variabilitas dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang ada dalam model regresi. Dengan kata lain, model regresi yang diuji mampu menjelaskan 13% dari total variasi dalam data, sedangkan sisanya sebesar 87% masih belum dapat dijelaskan oleh model ini.

Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Tabel 7. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.005	3	.002	6.147	.001 ^b
	Residual	.035	124	.000		
	Total	.040	127			

a. Dependent Variable: PE

b. Predictors: (Constant), PP, SILPA, PAD

Sumber: Output SPSS (2024)

Sesuai dengan hasil uji F pada Tabel 7 diatas, nilai F sebesar 6,147 dengan signifikansi (Sig.) sebesar 0,001. Nilai p-value yang sangat rendah (0,001) menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan secara statistik signifikan dalam menjelaskan variabilitas variabel dependen. Artinya, setidaknya satu dari variabel independen dalam model ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Parsial (Uji T)

Tabel 8. Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	.051	.002		23.061	.000
	PAD	-2.836E-12	.000	-.810	-3.808	.000
	SILPA	-2.501E-20	.000	-.151	-1.352	.179

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
PP	1.679E-12	.000	.744	3.375	.001

a. Dependent Variable: PE

Sumber: Output SPSS (2024)

Hasil uji t pada tabel 8 menunjukkan bahwa konstanta model regresi signifikan, dengan nilai t sebesar 23,061 dan signifikansi 0,000, memastikan intercept yang relevan. Untuk PAD memiliki nilai t sebesar -3,808 dengan signifikansi 0,000 menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sehingga H1 diterima. Namun, variabel SIIPA memiliki nilai t -1,352 dengan signifikansi 0,179, yang menunjukkan bahwa SILPA tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sehingga H2 ditolak. Sedangkan Pengeluaran Pemerintah memiliki nilai t 3,375 dengan signifikansi 0,001, yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sehingga H3 diterima. PAD dan Pengeluaran Pemerintah terbukti berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sementara SILPA tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Berganda

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.051	.002		23.061	.000
	PAD	-2.836E-12	.000	-.810	-3.808	.000
	SILPA	-2.501E-20	.000	-.151	-1.352	.179
	PP	1.679E-12	.000	.744	3.375	.001

a. Dependent Variable: PE

Berikut adalah persamaan regresi yang diperoleh dari hasil pengolahan data:

$$Y = 0.051 - 2.836 \text{ PAD} - 2.501 \text{ SILPA} + 1.679 \text{ PP} + e$$

Sumber: Output SPSS (2024)

Pada tabel 9 menunjukan bahwa nilai konstanta sebesar 0.051 menunjukkan nilai prediksi awal dari Y ketika semua variabel independen (PAD, SILPA, dan PP) bernilai nol. PAD dan SILPA memiliki koefisien regresi negatif, yang berarti bahwa peningkatan PAD dan SILPA cenderung mengurangi Pertumbuhan Ekonomi, meskipun SILPA tidak signifikan secara statistik. Sebaliknya, Pengeluaran Pemerintah memiliki koefisien positif yang signifikan, menunjukkan bahwa peningkatan Pengeluaran Pemerintah cenderung

meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. Dengan demikian, Pengeluaran Pemerintah dianggap sebagai faktor penting dalam mendorong Pertumbuhan Ekonomi, sementara PAD dan SILPA mungkin memerlukan kebijakan yang lebih hati-hati untuk mengurangi dampak negatifnya.

Pembahasan

Hasil analisis menunjukkan bahwa **PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi**, dengan nilai t sebesar -3,808 dan signifikansi 0,000. Koefisien regresi PAD sebesar -2,836 menunjukkan bahwa setiap peningkatan unit dalam PAD berhubungan dengan penurunan sebesar 2,836 pada Pertumbuhan Ekonomi. Ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD tidak selalu berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor seperti efisiensi pengelolaan PAD, ketidakefektifan alokasi anggaran, atau ketidakstabilan ekonomi lokal mungkin berkontribusi terhadap dampak negatif ini (Mulyadi, 2003; Endang Kusdiah, 2019; Safira Dini Aini, 2019). Hasil ini menyoroti pentingnya analisis mendalam terhadap penggunaan PAD untuk memastikan bahwa sumber daya ini dapat secara efektif mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hasil uji t untuk SILPA menunjukkan nilai t sebesar -1,352 dengan signifikansi 0,179, yang lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa **SILPA tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi**. Koefisien regresi SILPA sebesar -2,501 menunjukkan bahwa setiap peningkatan unit dalam SILPA berhubungan dengan penurunan sebesar 2,501 pada Pertumbuhan Ekonomi, meskipun hasil ini tidak signifikan secara statistik. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya efisiensi dalam pengelolaan SILPA atau ketidakefektifan alokasi anggaran yang berlebihan (Sugiarthi et al., 2014; Novandy et al., 2015). Penelitian ini menunjukkan bahwa surplus anggaran, seperti yang ditunjukkan oleh SILPA, tidak selalu berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, menyoroti perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap bagaimana SILPA digunakan dalam konteks kebijakan ekonomi daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah memiliki nilai t sebesar 3,375 dengan signifikansi 0,001, menunjukkan bahwa **Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi**. Koefisien regresi untuk PP sebesar 1,679 menunjukkan bahwa setiap peningkatan unit dalam PP berhubungan dengan peningkatan sebesar 1,679 pada Pertumbuhan Ekonomi. Ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dan alokasi dana yang efektif memiliki potensi untuk mempercepat ekspansi ekonomi (Zahari, 2017; Mahzalena et al., 2019). Pengeluaran pemerintah yang tepat dan efisien sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, diperoleh simpulan sebagai berikut: (1) PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun pengaruhnya bersifat negatif. Peningkatan dalam PAD cenderung dihubungkan dengan penurunan dalam pertumbuhan ekonomi. Temuan ini

mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa PAD dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, walaupun dampaknya tidak selalu positif. (2) SILPA tidak memiliki pengaruh signifikan dan bersifat negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenaikan dalam SILPA tidak terbukti berhubungan dengan perubahan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Temuan ini konsisten dengan beberapa studi lain yang juga tidak menemukan hubungan signifikan antara SILPA dan pertumbuhan ekonomi, menandakan bahwa faktor kontekstual dan metodologis mungkin mempengaruhi hasil ini. (3) Pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan dampak positif. Peningkatan dalam pengeluaran pemerintah berhubungan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mendukung studi-studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa belanja pemerintah, terutama dalam sektor-sektor seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, dapat mendorong ekspansi ekonomi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Saran

Mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan, nilai koefisien determinasi terbilang cukup rendah, sebab itu penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan strategi untuk meningkatkan PAD, karena hal ini merupakan pendorong penting pertumbuhan ekonomi dalam konteks penelitian ini. Selain itu Pemerintah Daerah juga dapat mempertimbangkan peningkatan investasi di berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial, sebagai cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian penelitian selanjutnya disarankan agar dapat menggunakan data dan variabel yang lebih banyak agar hasil penelitian yang diperoleh menjadi lebih akurat dengan variabel yang diukur lebih mampu mewakili model penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah di Kota Makassar. *Ekonomika*, 5(April), 17–37. <http://eprints.upnyk.ac.id/11978/>
- Ain, E. N., & Ma'ruf, M. F. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Sidoarjo. *Publika*. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/27/article/view/33377>
- Aldiansyah, N. F., Steviana, F., & Zakiah, F. (2019). Permasalahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI Tahun 2019. 15.
- Anitasari, M., & Soleh, A. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 117–127. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v3i2.139>
- Arizal, M., & Marwan, M. (2019). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ecogen*, 2(3), 433. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v2i3.7414>

- Asih, S., & Irawan, I. (2018). Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(1), 177–191.
- Dasmal, T., Basri, Y. M., & Indrawati, N. (2020). Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Intergovernmental Revenue, Temuan Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Al Iqtishad*, Edisi 16, Vol. 2, Tahun 2020, 2, 39–57.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. (2022). Laporan Realisasi APBD Provinsi di Indonesia.
- Endang Kusdiah, E., & Noviaty, D. E. (2019). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(2), 101-116.
- Erjergit, H., Rorong, I. P., & Tolosang, K. D. (2021). Pengaruh Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sorong. *Jurnal EMBA*, 9(2), 253-260.
- Fauzi, F., & Sekolah. (2016). Efek Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi Di Kabupaten Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 S/D. 1–23.
- Firmansyah, H., Anjani, A. N., Nurdianti, D., Miharja, L. N. A. D., Agustina, N., & Hariadi, H. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah Dan Zakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Barat. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 02(01).
- Hafandi, R., & Romandhon, D. (2020). *Pendapatan Asli Daerah: Analisis dan Implementasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hasibuan, J. S. (2015). Analisis Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kota Medan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, Vol.3, No.1, Halaman 53-61, 3(1), 53–61.
- Hidayah, N., Busari, A., & Kustiyawan, A. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kalimantan timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*, 4(1).
- Hidayah, N., & Setyawati, H. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi*, 18(1), 45-58.
- Iqbal, M., & Sunardika, R. (2018). Retribusi Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(1), 55-68.
- Jotro Simanjuntak, J. (2018). Pengaruh PAD dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*

- Daerah, 9(1), 32-45.
- Kamba, B., Koleangan, R. A. M., & Tumilaar, R. L. H. (2021). Pengaruh Investasi Swasta, Pengeluaran Pemerintah, Angkatan Kerja Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 9(1), 515–527. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32314>
- Kartoprawiro, S., & Susanto, Y. (2018). Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 16(1), 1–14. <https://doi.org/10.29259/jmbs.v16i1.6242>
- Kemenkeu. (2017). Laporan Realisasi APBD dan Pengelolaan SILPA. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Khairudin, & Erlanda, R. (2016). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Se-Sumatera. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 7, No. 2*, September 2016 Halaman 137 - 154, 7(June).
- Kusnandar, V., & Siswantoro, A. (2012). Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Otonomi Daerah*, 9(1), 25-36.
- Lestari, N. N. S. A., Bagia, I. W., & Jana, G. P. A. S. (2018). Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Apbn) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(1), 24–33.
- Mariani, E., & Utami, W. (2019). The effects of local government size, income per capita, local government wealth and audit opinion on the quality of internet financial reporting disclosure: Studies in Indonesia. *Scholars Bulletin*, 5(11), 611-619.
- Marit, M., Syahputra, D., & Zaini, M. (2021). Otonomi Daerah dan Kemandirian Fiskal. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 15(3), 182-199.
- Moe, T. (1984). The New Economics of Organization. *American Journal of Political Science*, 28(4), 739-777.
- Mulyadi, M. (2003). Akuntansi Pemerintahan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Nashar, A., & Sari, Y. (2021). Teori Keagenan dalam Sektor Publik. *Jurnal Ekonomi Publik*, 9(2), 112-126.
- Novandy, A., Palampanga, A. M., & Ridwan, R. (2015). Pengaruh Belanja Langsung dan SILPA terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Tengah. *e-Jurnal Katalogis*, 3(9), 55-67.
- Putra, S. K. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus Pada 38 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014).
- Rosmawati, S. (2021). Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran

- 2015-2019. *Citra Ekonomi*, 2(1), 43–51.
- Safira Dini Aini, S. D. (2019). The Influence of Local Revenue and Equalization Fund on Economic Growth in East Nusa Tenggara Province. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(2), 125-134.
- Sambodo, M. T., & Marita, Y. (2019). Hubungan Antara Legislator dan Agen dalam Pembuatan Kebijakan. *Jurnal Ilmu Politik*, 8(1), 113-127.
- Sanjaya, D., & Helmy, H. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kekayaan Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia periode 2015-2019. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(2), 450–469. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i2.369>
- Sari, N., Djuanda, G., & Sarwani, S. (2018). Pengaruh Dana Perimbangan, Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 91–100. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v3i1.92>
- Siri, R., Hasniaty, H., & Mariana, L. (2022). Strategi Kebijakan Fiskal Menangani Dampak Pandemi. *Ekonomika*, 6, 96–109.
- Sugiarthi, D. Y., Sutrisno, A., & Rahmat, D. (2014). Efisiensi Pengelolaan SILPA dalam Penganggaran Daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 9(2), 215-230.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukma Mulya, K., Anggraeni, A. F., Pancawati, N. L. P. A., Edy, S. A., Muslih, R. A., Ilyas, H., & Utami, F. L. (2024). *Buku Ajar Dasar Ilmu Akuntansi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Supriyanto, R., & Hariani, S. (2022). Dampak akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana, kebijakan, dan kelembagaan desa pada kesejahteraan masyarakat. *Journal of Public Auditing and Financial Management*, 2(1), 1-10.
- Tumbel, S. D. A., Koleangan, R. A. M., & Engka, D. S. M. (2018). Pengaruh Belanja Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(5), 46–60. <https://doi.org/10.35794/jpekd.19389.19.5.2018>
- Utami, W., & Nugroho, L. (2019). Going concern studies of government social enterprise in Indonesia (Village Government Enterprises Case/Bumdes-Lebak Region, West Java Province-Indonesia. *International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries*, 3(5), 191-206.
- Waluyo, A., & Suryono, D. (2015). Teori Keagenan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 6(2), 98-112.

- Yuliantoni, Y., & Arza, H. (2021). Analisis SILPA dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(1), 88-104.
- Zahari, M. (2017). Dampak Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 123-140.
- Zelmiyanti, Z. (2016). Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah Dan Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 11–21.
- Zulfina, M., & Gunawan, A. (2018). PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Analisis dengan Pendekatan Ekonometrika. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 9(1), 67-83.